

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Imigran merupakan sekumpulan orang asing yang melakukan perjalanan ke negara lain untuk mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan hidup, sedangkan imigran ilegal merupakan sekumpulan orang asing yang memasuki negara lain secara ilegal tanpa menggunakan dokumen yang sah. Amerika Serikat merupakan negara demokratis yang menjunjung hak asasi manusia dan sebagai negara penerima imigran terbanyak di dunia. Sehingga AS menjadi tujuan para imigran untuk mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan hidup sebab AS sebagai negara maju pasti bisa meningkatkan kesejahteraan para imigran tersebut. Kebanyakan para imigran tersebut berasal dari negara yang sedang mengalami konflik dan banyaknya tindakan kriminal seperti Meksiko, Honduras, Guatemala dan El Salvador.

Donald Trump sebagai presiden ke 45 AS pada tahun 2017 memiliki ambisi dalam meningkatkan keamanan negara dan menggunakan visi kebijakan luar negeri “American First” melalui penegakkan hukum migrasi yang cukup kontroversial. Trump yang dikenal sebagai pemimpin yang anti imigran, seperti yang disampaikan saat kampanye 2016 untuk mengurangi arus imigran terutama di jalur perbatasan AS-Meksiko. Dalam upaya penurunan imigran ini, Trump menerapkan kebijakan Migrant Protection Protocol (MPP) atau “*Remain in Mexico*” yang diresmikan pada Januari 2019 yang memiliki tujuan untuk mengembalikan para imigran ilegal untuk kembali ke Meksiko sambil menunggu proses persidangan migrasi berlangsung.

Dalam pengimplementasian MPP dari tahun 2019 hingga 2021 berhasil memulangkan sebanyak 70.000 imigran ke Meksiko dan menurunkan angka imigran ilegal di perbatasan sebanyak 1,26 juta. Kebijakan MPP terbukti efektif dalam menjalankan operasional namun kebijakan ini juga melanggar hak asasi manusia para imigran serta ketidakpatuhan terhadap sistem AS, sehingga kebijakan MPP ini cukup kontroversial dan mendapatkan kritikan dari politikus seperti Kongres dan Aktivistis HAM.

Trump dengan latar belakang seorang pengusaha menuai kontra karena kebijakan MPP yang dinilai tidak mencerminkan AS sebagai negara demokratis dan menjunjung tinggi HAM para imigran. Trump juga menggunakan wewenang untuk menangani sistem migrasi melalui perintah eksekutif dalam pembuatan dan perancangan kebijakan MPP tanpa melalui kongres. Dalam menjalankan prosedur MPP ini, Trump memerintahkan DHS dalam penegakkan MPP agar tujuannya tercapai. Dalam gaya kepemimpinan Trump dapat dilihat dari tiga indikator yaitu *Goal Driven*, *Task Oriented*, dan *Task Motivated*.

Pertama, gaya kepemimpinan Trump yang mendorong pada pencapaian atau tujuan (*Goal Driven*) berfokus pada perancangan kebijakan serta menentang hambatan-hambatan yang dapat menghambat pengimplementasian MPP. Trump dalam mencapai tujuan "*American First*" tersebut menggunakan retorika dengan menyebutkan bahwa imigran merupakan ancaman bagi keamanan nasional AS. Sehingga dalam pengimplementasian MPP secara cepat mencapai tujuan untuk menurunkan angka imigran. Tetapi dibalik itu, MPP banyak dikritik untuk menanggulangi pelaksanaan namun Trump tetap melakukan prosedur MPP sebagaimana kebijakan ini berimplikasi pada tujuan yang jelas.

Kedua, gaya kepemimpinan Trump yang berorientasi pada hasil (*Task Oriented*) yang berfokus pada pelaksanaan kebijakan MPP agar tujuannya dapat dicapai. Hal ini dapat dilihat pada perintah eksekutif yang menetapkan DHS untuk tanggung jawab dalam memastikan jalannya prosedur MPP di perbatasan berupa penangkapan dan pemuangan imigran serta memberikan surat pemberitahuan sidang. Trump juga menegakkan hukum migrasi berdasarkan pasal 235 (b)(2)(C) mengenai pemulangan imigran yang memasuki AS untuk dipulangkan ke wilayah dekat perbatasan.

Ketiga, gaya kepemimpinan Trump yang termotivasi pada tugas (*Task Motivated*) dalam mencapai prioritas yang nyata dalam kebijakan MPP berupa pembangunan tembok pembatasan dan penurunan arus imigran. Gaya kepemimpinan *Task Oriented* dan *Task Motivated* sama berorientasi pada tugas sebagai pemimpin melalui kebijakan yang sudah dibuat dalam mencapai hasil atau tujuan yang nyata. Trump juga menegakkan penegakkan hukum migrasi terhadap para imigran agar menekan angka migrasi ilegal yang kerap terjadi di perbatasan AS-Meksiko.

Dari ketiga kategori tersebut dapat disimpulkan bahwa Trump seorang pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan populisme. Pemimpin yang populisme merupakan pemimpin yang lebih mengedepankan kepentingan rakyat tanpa harus mementingkan kritikan dari unit-unit politik lainnya seperti kongres dan partai politik. Trump sebagai pemimpin yang populisme ditandai dengan adanya bentuk sikap yang tegas terhadap imigran yang diinterpretasikan dalam kebijakan MPP untuk menurunkan angka imigran yang ada di AS terutama di

perbatasan AS-Meksiko. Trump menganggap bahwa imigran tersebut sebagai ancaman bagi keamanan rakyat serta kepentingan nasional negara AS.

5.2 Saran

Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna sehingga dalam penelitian selanjutnya peneliti menyarankan untuk meneliti bagaimana tentang pelanggaran HAM yang dilakukan selama pengimplementasian MPP. Sehingga penelitian selanjutnya mewujudkan penelitian yang analitis yang bisa menjadi sebuah karya ilmiah.

